

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PEKON WONODADI
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh:

REZA AGUNG FERNANDA

1916041055



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PEKON WONODADI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

Reza Agung Fernanda

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu pekon yang menjadi pelaksana program keluarga harapan. Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di Pekon Wonodadi adalah kurang maksimalnya pendampingan karena pergantian pendamping, kurangnya koordinasi antara pendamping PKH Pekon Wonodadi dengan pendamping Korcam Gadingrejo, dan jumlah KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang tertinggi se Kecamatan Gadingrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Pekon Wonodadi pada pilar organisasi yaitu pendamping sosial PKH sebagai pelaksana PKH, pada pilar interpretasi terdapat kegiatan P2K2 sebagai kegiatan penyampaian materi kepada kelompok sasaran serta pelatihan kepada pendamping sebagai kegiatan peningkatan kualitas SDM pendamping PKH, dan pada pilar aplikasi terdapat SOP dalam melaksanakan PKH. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN EFFORTS TO OVERCOME POVERTY IN WONODADI VILLAGE GADINGREJO DISTRICT PRINGSEWU REGENCY

By

Reza Agung Fernanda

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides cash assistance to Very Poor Households (RTSM) and RTSM family members are required to fulfill the specified requirements and conditions. Wonodadi Pekon, Gadingrejo District, Pringsewu Regency is one of the pekons implementing the family hope program. The phenomenon that occurs in PKH implementation in Wonodadi Village is less than optimal assistance because PKH social Assistant exchange, lack of coordination between Village's Social Assistan and district coordinator social assistant, and the total number of KPM in Wonodadi Village is the highest in Gadingrejo District. This research aims to explain and analyze the implementation of the Family Hope Program in Pekon Wonodadi, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results of the research show that the implementation of PKH in Pekon Wonodadi in organization pilar includes PKH social assistants as the implementer, in interpretation pilar there are P2K2 activities also training for PKH social assistant in order to improve the PKH social assistant human resource quality, and in application pilar there are SOPs for implementing PKH. This is in accordance with Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program.

Keywords: Implementation, Family Hope Program, Poverty

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PEKON WONODADI
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh
Reza Agung Fernanda
1916041055**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi

: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Nama Mahasiswa

: Reza Agung Fernanda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916041055

Program Studi

: ADMINISTRASI NEGARA

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si
NIP. 19710122 199512 2 001

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si
NIP. 19700914 200604 2 001

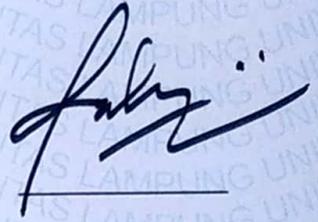
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

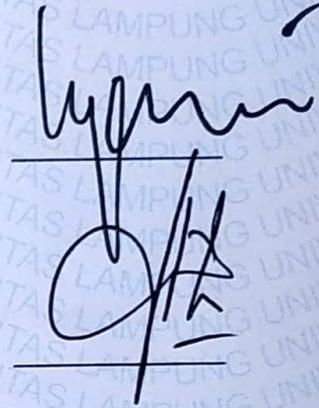
1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Rahayu Sulistiowati S.Sos., M.Si



Sekretaris

: Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si



Penguji Utama

: Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.A.P

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Februari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Reza Agung Fernanda
NPM. 1916041055

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada 15 Mei 2001 dan dibesarkan dalam keluarga dari bapak alm. H. Warsono dan Ibu H. Marilah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dan memiliki seorang kakak perempuan dan kakak laki laki.

Tahun 2007, penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Sidodadi dan lulus pada 2013, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 2 Gadingrejo dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung yang diterima melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga saat ini.

Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus seperti kegiatan organisasi mahasiswa. Pada tahun 2022 penulis mengikuti program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu dan pada tahun tersebut juga penulis menjadi kepala bidang Hubungan Luar (HUBLU) di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra’d:11)

“Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin dialah tergolong orang yang celaka”

(HR. Al-Hakim)

“Tidak akan ada kemenangan tanpa pengorbanan”

(Reza Agung Fernanda)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT, Saya persembahkan karya ini untuk:

KELUARGA BESAR AYAH DAN IBUKU TERCINTA
Alm Bapak Wasono dan Ibu Marilah

Yang selalu memberikan doa dan dukungan
Terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang
yang telah diberikan

*PARA PENDIDIK DAN CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
LAMPUNG*

Terimakasih telah memberikan banyak ilmu serta moral untuk
melangkah di kehidupan masa depan

SANWACANA

Ucapan rasa syukur diucapkan kepada Allah Swt. dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan, waktu kesempatan, dan kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.”

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Dengan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Untuk keluargaku tercinta, alm Ayah, ibu, dan kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat, cinta, perhatian, pengorbanan, dan motivasi.
2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, saran dan bimbingannya.
3. Ibu Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing pembantu. Terimakasih atas ilmu, waktu, dan saran yang diberikan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.A.P selaku dosen penguji skripsi. Terimakasih atas semua saran dan masukan yang diberikan untuk penulis agar dapat mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.
5. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh pengurusan HIMAGARA Kabinet arutala. Terimakasih atas pengalaman yang diberikan selama kepengurusan.
8. Kepada seluruh teman-teman GRANADA yang sudah memberikan pengalaman suka dan duka selama perkuliahan. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
9. Kepada bapak ibu bidang P2M Bappeda Kabupaten Pringsewu, Pak Chris, Pak

Bambang, Bu Lia, Bu Keke, dan Mas Rizal. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.

10. Kepada diri sendiri. Terimakasih sudah berjalan dengan tegar, bertahan, dan berani menghadapi semua masalah yang datang, *Viva la vida*.
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik.....	15
2.2.1 Proses Kebijakan Publik	16
2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan	17
2.4 Model Implementasi Kebijakan	18
2.4.1 Model george C Edward III.....	19
2.4.2 Model Merilee S Grindle.....	20
2.4.3 Model Van Meter & Van Horn	21
2.4.4 Model Charles O Jones.....	23
2.5 Tinjauan Program Keluarga Harapan.....	26
2.5.1 Tujuan PKH.....	26
2.5.2 Keluarga Penerima Manfaat PKH	27
2.6 Tinjauan Kemiskinan	28
2.6.1 Jenis-jenis Kemiskinan.....	28
2.6.2 Indikator Kemiskinan	30
2.6.3 Penanggulangan Kemiskinan	30
2.7 Kerangka Berpikir	32

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan	33
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1 Data Primer	35
3.4.2 Data Sekunder	35
3.5 Instrumen Penelitian	36
3.5.1 Instrumen Wawancara	36
3.5.2 Instrumen Dokumentasi	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1 Wawancara	36
3.6.2 Observasi	37
3.6.3 Dokumentasi	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.7.1 Reduksi data	39
3.7.2 Penyajian Data	39
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	39
3.8 Teknik Keabsahan Data	40
1) Uji Kredibilitas	40
a. Kecukupan Referensi	40
b. Teknik Triangulasi	41
1. Triangulasi Sumber	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pekon Wonodadi	43
4.1.1 Kondisi Pekerjaan Warga	42
4.1.2 Kondisi Ekonomi	43
4.1.3 Letak Geografis	44
4.1.4 Potensi Pekon	45
4.1.5 Jumlah dan Persebaran Penduduk	45
4.2 Gambaran Umum PKH di Pekon Wonodadi	46

4.3 Hasil dan Pembahasan.....	49
4.3.1 Pilar Organisasi	49
4.3.1.1 Sumber Daya	50
4.3.1.1.1 Sumber Daya Manusia	50
4.3.1.1.2 Sumber Daya Finansial.....	55
4.3.1.1.3 Sarana dan Prasarana	57
4.3.1.2 Struktur Organisasi.....	60
4.3.1.3 Metode-metode.....	65
4.3.2 Pilar Interpretasi	68
4.3.3 Pilar Aplikasi atau Penerapan	75
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM).....	6
2. Penelitian Terdahulu	10
3. Daftar Informan.....	37
4. Dokumentasi Penelitian	38
5. Jumlah Penduduk Bekerja Pekon Wonodadi	42
6. Jenis Pekerjaan Penduduk Pekon Wonodadi	43
7. Bantuan PMT pekon Wonodadi.....	44
8. Jenis Lahan di Pekon Wonodadi	45
9. Jumlah KK dan Penduduk Pekon Wonodadi	46
10. Klasifikasi Komponen PKH.....	47
11. Kelompok Penerima Manfaat PKH Pekon Wonodadi.....	48
12. Tabel SP2D PKH Pekon Wonodadi.....	57
13. Tabel Pilar Organisasi	68
14. Tabel Pemberian Materi Modul P2K2	70
15. Jadwal Kegiatan Pendamping PKH Wonodadi	78
16. Triangulasi.....	98

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1. Jumlah penduduk miskin Indonesia	2
2. Jumlah penduduk miskin Pringsewu.....	5
3. Model Implementasi Edward III	20
4. Model Implementasi Van Meter & Van Horn	23
5. Model Implementasi Charles O Jones.....	25
6. Kerangka Pikir	32
7. Model Analisis Data Interaktif.....	39
8. Struktur Organisasi Pekon Wonodadi.....	41
10. Tempat Pertemuan P2K2 PKH di Kediaman Ketua Kelompok	58
11. Struktur Organisasi Puskesmas Pekon Wonodadi	62
12. Balai Pekon Wonodadi.....	62
13. Ruang Puskesmas di Balai Pekon	63
14. Struktur Pelaksanaan PKH.....	64
15. Kegiatan P2K2 PKH Pekon Wonodadi	74
16. Alur Pelaksanaan PKH	77
17. Laporan Bulanan Pendamping	77
18. Gerai BRI-Link Sebagai Tempat Pengambilan Bantuan PKH	113
19. Pemberian PMT Balita Pekon Wonodadi	113
20. Pemberian PMT Ibu Hamil	114
21. Pemberian PMT Lansia.....	114
22. Wawancara dengan Pendamping PKH Pekon Wonodadi.....	115
23. Wawancara dengan Kasi Kesra Pekon Wonodadi	115
24. Wawancara dengan Ketua Puskesmas Pekon Wonodadi	116
25. Rencana Pertemuan dengan Pendamping Korcam Gadingrejo	116
26. Rencana Pertemuan dengan Pendamping Korcam Gadingrejo	117
27. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 3	117
28. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 4	118
29. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 5	118
30. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 8	119
31. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 2	119
32. Wawancara dengan Ketua Kelompok Dusun 1	120
33. Observasi Kegiatan P2K2	120
34. Wawancara dengan KPM awal PKH di Pekon Wonodadi	121

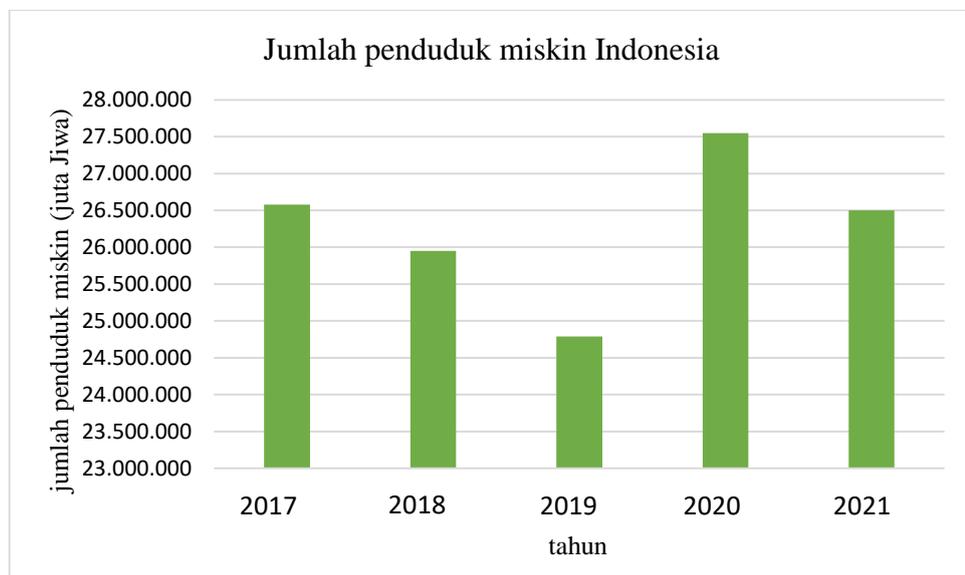
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subandi dalam Purba (2021) pembangunan ialah proses perubahan yang dilaksanakan pada segala aspek kehidupan rakyat yang bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan, Pembangunan nasional merupakan proses yang dilaksanakan bertahap melalui segala aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Witjaksono dalam Purba (2021) Proses pembangunan meliputi aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan agar terselenggaranya kehidupan dan negara yang maju dan demokratis sesuai dengan Pancasila. Mankiw dalam Purba (2021) pembangunan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu negara seperti masalah utama yaitu ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran.

Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah perkonomian yang selalu disorot. World Bank dalam Hendra (2010) Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dalam mencapai standar hidup minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya Assegaf dalam Dicky (2020) kemiskinan adalah kondisi kurangnya pendapatan individu dalam mencukupi keperluan dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang

layak.. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya alat pemenuh keperluan dasar ataupun kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun kurangnya lapangan pekerjaan (Assegaf, 2015). Kesenjangan ekonomi antara golongan masyarakat dengan pendapatan tinggi dan dengan pendapatan rendah dan orang-orang yang terdapat di bawah garis kemiskinan adalah dua permasalahan yang sering ditemui di negara berkembang maupun negara maju. Perbedaannya adalah seberapa besar tingkat kesenjangan yang ada di setiap negara (Gwartney, et.al.,2011). Dari beberapa definisi diatas bisa dipahami kemiskinan merupakan keadaan individu dan atau keluarga yang tidak bisa mencukupi keperluan dasarnya. Berikut adalah data angka kemiskinan di Indonesia



Gambar 1. Jumlah penduduk miskin Indonesia

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara Nasional Pemerintah pusat menginisiasi beberapa program yang

memiliki tujuan untuk mewujudkan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa program nasional yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

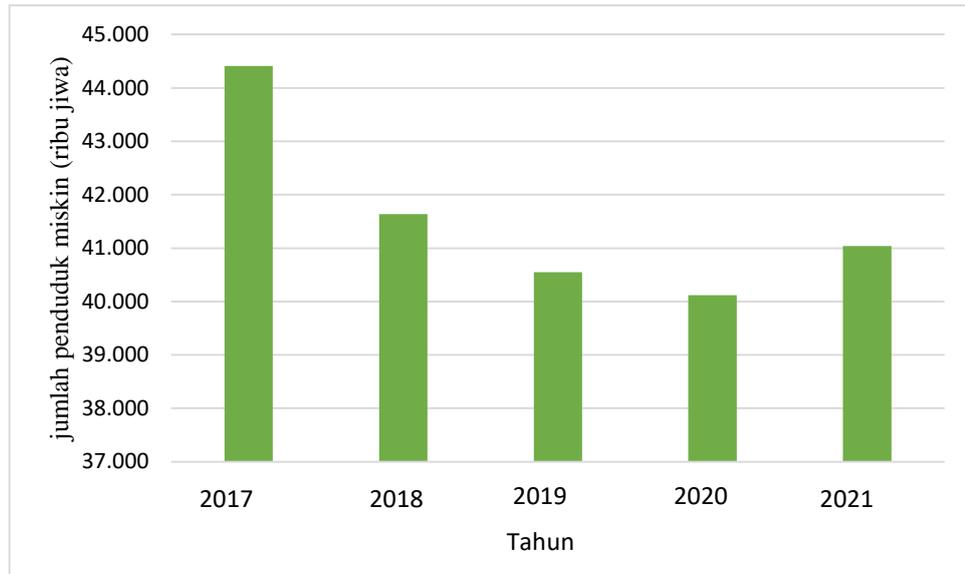
PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan. Kegiatan PKH juga merupakan upaya yang mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Millenium dengan lima indikator yaitu, pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita seta pengurangan kematian ibu melahirkan. PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. PKH dilaksanakan sebagai pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Penanggulangan Pembangunan yang berkeadilan dan Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Komponen bantuan PKH terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesehatan untuk ibu hamil/menyusui dan anak kecil berusia 0-6 tahun;
2. Pendidikan untuk anak sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat; dan
3. Kesejahteraan sosial bagi lansia serta penyandang disabilitas.

Dalam Implementasi kebijakan, sumber daya merupakan aspek yang penting seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Sasmito & Ertien (2019) yang mengungkapkan jika kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya akan menghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya Liahati dan

Dewi (2018) sumber daya dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat. Kemudian Antonia (2016) terdapat sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang bisa mendukung berjalannya implementasi kebijakan, jika terdapat kekurangan dari segi kualitas sumber daya manusia akan menghambat implementasi kebijakan begitu juga dengan kurangnya sumber daya finansial bisa menghambat implementasi kebijakan. Penelitian yang akan dilaksanakan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak di teori dan fokus yang akan berfokus kepada indikator implementasi kebijakan Charles O Jones (1984) yaitu, 1) organisasi, 2) interpretasi, serta 3) aplikasi

Berdasarkan Laporan Peaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021 Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu permasalahan dalam proses pembangunan. Dari tahun 2017-2020 telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan (LP2KD) Tahun 2021, kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh dua hal yaitu 1) belum memiliki pekerjaan tetap, 2) penyebaran virus Covid-19 yang berimplikasi pada pemutusan hubungan kerja. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu prioritas yang ditanggulangi dengan melibatkan berbagai pihak serta keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (LP2KD, 2021). Berikut ini adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu:



Gambar 2. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu.

sumber: BPS Pringsewu 2021

Dilihat dari grafik diatas angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengimplementasikan program-program dibidang penanggulangan kemiskinan untuk terus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program PKH merupakan program yang memberikan bantuan sosial dengan syarat untuk keluarga atau perorangan yang tergolong miskin dan rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanggulangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan telah ditetaskan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Dalam proses terlaksananya PKH, bantuan yang diberikan dengan sebuah persyaratan yang bertujuan untuk menyeleksi masyarakat yang benar-benar miskin agar bisa mendapatkan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, anak-anak, serta lansia. Program PKH sudah dilaksanakan di berbagai daerah Kabupaten Pringsewu, salah satunya adalah di Kecamatan Gadingrejo. Kecamatan Gadingrejo terdiri atas 23 Pekon dan terdapat 4.116 KPM PKH. Masing-

masing dari pekon tersebut memiliki 1 pendamping PKH yang berarti terdapat 23 pendamping di Kecamatan Gadingrejo. Dibawah ini adalah jumlah KPM per Pekon di Kecamatan Gadingrejo.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

No	Pekon	Jumlah KPM
1	Wonodadi	402
2	Tulung Agung	351
3	Gadingrejo	306
4	Blitarejo	304
5	Tegalsari	237
6	Bulurejo	228
7	Parerejo	225
8	Bulukarto	208
9	Kediri	185
10	Tambah Rejo	177
11	Wonosari	163
12	Mataram	155
13	Panjerejo	152
14	Gadingrejo utara	147
15	Yogyakarta	126
16	Gadingrejo timur	110
17	Wonodadi Utara	109
18	Wates Timur	107
19	Yogyakarta Selatan	104
20	Tambah Rejo Barat	92
21	Wates	77
22	Klaten	77
23	Wates Selatan	74

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Tahun 2022

Jika dipahami tabel 1.1, bisa dilihat angka KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang tertinggi diantara pekon lainnya. Program PKH di Pekon Wonodadi sudah dilaksanakan sejak awal dibentuknya program PKH yakni 2012 sampai dengan sekarang. Namun, KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang tertinggi se Kecamatan Gadingrejo. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Yunika Sari selaku KPM PKH dan Bapak Nahiri selaku Ketua PUSKESOS Pekon Wonodadi, kendala yang dialami KPM adalah terdapat pergantian pendamping PKH pada Desember 2022 setelah itu terdapat kekosongan pendamping PKH dari Januari sampai Februari

2023 dan mendapatkan pendamping lagi pada Maret 2023. Selama pergantian tersebut jarang sekali dilakukan pertemuan rutin KPM jika ada pertemuan pun yang dilibatkan hanya ketua-ketua KPM sehingga menyebabkan permasalahan seperti KPM yang mengadu kepada Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Pekon Wonodadi, padahal Puskesos hanya berperan dalam mencari data calon KPM tidak berperan dalam pelaksanaan PKH. (Wawancara, 2 Mei 2023).

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi PKH terjadi karena belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) pendamping PKH dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap implementasi PKH serta terdapat pergantian pendamping PKH karena pendamping yang lama lalai dalam menjalankan tugas. Program Keluarga Harapan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika belum diimplementasikan dengan benar. Linawati dalam Koswara (2023) Kebijakan Program PKH tidak akan berjalan dengan maksimal jika belum diimplementasikan dengan baik.

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena setelah diimplementasikan bisa dilihat kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Implementasi kebijakan tentunya bukan hal yang mudah karena banyak faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji. Program PKH bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi dengan kendala yang dialami pada implementasi PKH di Pekon Wonodadi mengakibatkan tujuan PKH belum tercapai dengan optimal.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan PKH di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, permasalahan tersebut penting untuk diteliti lebih lanjut karena sebuah kebijakan tidak akan tercapai tujuannya jika tidak diimplementasikan

dengan maksimal. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini bertujuan sebagai pengayaan praktik dalam keilmuan administrasi publik mengenai implementasi Program Keluarga Harapan.

b. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini sebagai masukan terhadap

lembaga terkait, terutama pelaksana PKH Pekon Wonodadi dalam melaksanakan Program PKH sehingga bisa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Program PKH.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi sebagai acuan. Peneliti akan melanjutkan penelitian yang dilaksanakan oleh Liahati & Dewi Citra Lestari dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu*. Beliau menggunakan indikator implementasi kebijakan menurut Geroge C Edward III. Perbedaan dan kebaruan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak di teori dan fokus yang akan berfokus kepada indikator implementasi kebijakan Charles O Jones (1984) dalam Rosita (2023) yaitu, 1) organisasi, 2) interpretasi, serta 3) aplikasi.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. (Samirudin, dkk 2022)	Implementasi kebijakan 1)Standar dan sasaran kebijakan 2)Sumber daya 3)Keterkaitan antar organisasi 4)Karakter dan sifat agen pelaksana 5)Kondisi sosial politik, dan ekonomi 6)Disposisi	1) standar dan sasaran kebijakan telah terlaksana dengan standar dan sasaran kebijakan yang dipatenkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang diberlakukan yaitu siswa yang sedang sekolah dari jenjang SD sampai SMA.

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
	implementor (Van Meter & Van Horn)	<p>2) sumber daya telah terlaksana sesuai dengan prosedur penerimaan pendamping berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.</p> <p>3) dialog dilakukan melalui rapat yang diadakan pendamping PKH.</p> <p>4) pendamping sangat tegas dalam menjalankan tugas serta memberi sanksi ketika ditemukan KPM yang tidak berkomitmen.</p> <p>5) Pendamping berlaku tegas kepada KPM yang melanggar peraturan. Sikap KPM sebagai sasaran program memaksakan anaknya untuk selalu rajin ke sekolah dan jika tidak rajin sekolah akan dikenakan sanksi.</p>
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). (Retno,dkk 2022)	<p>1) Komunikasi</p> <p>2) Sumber daya</p> <p>3) Struktur birokrasi</p> <p>4) disposisi (George C. Edward III)</p>	<p>1) komunikasi yang dilakukan implementor kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai pedoman, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penyampaian informasi kepada KPM, tetapi tetap teratasi dengan baik oleh pihak implementor.</p> <p>2) Sumber daya ditinjau dari sumber</p>

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
		<p>daya manusia untuk implementor PKH sudah sangat cukup dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH.</p> <p>3)Struktur birokrasi yang ada telah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada buku Pedoman Pelaksanaan PKH dan mengikuti arahan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Tim Koordinasi Provinsi, dan Tim Koordinasi Nasional PKH.</p> <p>4)Disposisi ditemukan penyimpangan pada sifat dan sikap tidak jujur tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH dan Petunjuk Teknis Penyaluran PKH dengan aktivitas para pendamping yang sering meminta uang lebih dari masyarakat dengan alasan pengurusan prosedur pencairan dana, kesewenangan dalam memegang kartu ATM penerima bantuan sampai pengambilan dana tanpa konfirmasi dengan koordinator PKH Kabupaten.</p>
Implementasi program keluarga harapan	1)Komunikasi 2)Sumber daya 3)Struktur birokrasi	1) komunikasi sudah baik dan lancar dengan membentuk

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
<p>Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota batu. (Cahyo Sasmito & Ertien Rining N, 2019)</p>	<p>4)disposisi (George C. Edward III)</p>	<p>adanya rapat koordinasi, seminar dan matrikulasi untuk membekali pendamping PKH. 2) sumber daya melibatkan pendamping PKH dan peserta PKH, banyak peserta PKH yang memiliki riwayat pendidikan menengah kebawah, oleh sebab itu mereka memiliki batasan dalam keahlian. 3) struktur birokrasi memberikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk kepala bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial untuk berkoordinasi dengan pendamping PKH dalam menjalankan dan pembinaan untuk peserta PKH berupa pemberian sanksi dan pinalti kepada peserta yang tidak memenuhi syarat. 4) disposisi pendamping PKH dan peserta PKH sudah baik, namun terdapat sejumlah peserta yang kurang baik dari sisi kerja sama dan tanggung jawab terkhusus pada batas akhir pengisian syarat dan ketentuan ini yang tidak diperhatikan peserta.</p>

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan sisir kecamatan batu kota batu. (Liahati & Dewi Citra Lestari, 2019)	Implementasi program 1)komunikasi 2)sumber daya 3)disposisi 4)struktur birokrasi (George C, Edward III)	1)penyampaian informasi sudah sangat baik dengan adanya tanggung jawab, pemberian motivasi dan meningkatkan kesadaran peserta program PKH terkait sikapnya untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan sekitar. 2) sumber daya sangat penting untuk mengembangkan pemikiran masyarakat, oleh sebab itu, pendampingan yang intensif diperlukan agar penyaluran dana PKH tepat sasaran. 3) struktur birokrasi pada saat pelaksana program PKH dari pusat menyambangi provinsi kemudian menyambangi Kabupaten/kota lalu ke kecamatan. 4) disposisi selalu tanggap dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta program dengan bersikap sabar, akrab, menghargai dan rendah hati.
Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. (Nirwanasari, 2020)	Implementasi Program 1)Pengorganisasian 2)interpretasi 3)Penerapan (Charles O Jones)	1)Pengorganisasian yang dijalankan oleh pendamping masyarakat dan Badan Keswadayaan masyarakat belum

Judul, Peneliti & Tahun	Fokus	Hasil
		<p>dijalankan dengan semestinya karena SDM dari kelompok swadaya masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat masih rendah.</p> <p>2) pelaksana hanya memberikan interpretasi dalam bentuk lisan dan para pelaksana punya interpretasi yang berbeda-beda mengenai program di lapangan dan sosialisasi dilakukan secara tidak menyeluruh.</p> <p>3) Tidak terdapat prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan yang tidak pasti. Jadwal pencairan dana dan pembangunan rumah maupun perbaikan rumah penerima bantuan tidak jelas sehingga proses pembangunan tidak terarah.</p>

Sumber: diolah peneliti, 2024

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam Widodo (2021) menjelaskan jika kebijakan publik merupakan kegiatan yang memiliki maksud dan dijalankan oleh aktor atau beberapa aktor dalam mengatasi masalah atau permasalahan atau

masalah yang menjadi perhatian. Selanjutnya Thomas R.Dye dalam Widodo (2021) menjelaskan jika kebijakan adalah segala bentuk tindakan yang ingin dijalankan dan kerjakan serta segala bentuk tindakan yang tidak dikerjakan dan lakukan. Kemudian W.I Jenkins dalam Widodo (2021) menjelaskan jika kebijakan publik berupa sejumlah keputusan yang ditetapkan oleh seorang aktor publik yang fokusnya ada pada tercapainya tujuan pada situasi khusus. Friedrich dalam Wahab (1991) menjabarkan kebijakan ialah langkah yang ditujukan oleh pemangku kepentingan yang ada dalam suatu lingkungan dengan bermacam permasalahan dan seraya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dari penjelasan di atas dapat dipahami jika kebijakan publik ialah tahapan atau keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan untuk menuntaskan permasalahan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan penjabaran definisi di atas, Anderson (Widodo, 2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan yang memiliki tujuan pasti dan akan tercapai.
2. Mencakup aksi yang dilaksanakan pejabat pemerintah.
3. Apapun yang dilaksanakan pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Bersifat positif dengan pemerintah yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk melaksanakan sesuatu dan bersifat negatif jika pemerintah tidak melaksanakan sesuatu.
5. Kebijakan yang bersifat positif harus berdasar peraturan yang memiliki sifat mendesak.

2.2.1 Proses Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Widodo, 2021:16) untuk membuat kebijakan perlu melalui proses panjang yang meliputi:

1. Identifikasi masalah

Masalah diidentifikasi dengan menganalisis apa yang menjadi sumber permasalahan yang menjadi dasar aksi yang dilaksanakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Tahap penyusunan adalah kegiatan yang berfokus pada pejabat pemerintahan dan media masa dalam memutuskan atas masalah publik.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulacy*)
Perumusan kebijakan merupakan tahap untuk mengusulkan rancangan kebijakan dengan melibatkan organisasi yang melakukan penyusunan usulan kebijakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan adalah tahap melaksanakan kebijakan dengan melibatkan segala sumber daya, sarana dan prasarana, dan aktivitas eksekutif yang terorganisir.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan adalah tahap yang dilaksanakan untuk melakukan penilaian kepada sebuah kebijakan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan konsultan di luar pemerintah dan unsur masyarakat.

2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah tahap penentuan dari proses kebijakan terlaksana dengan efektif yang disebabkan oleh implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terarah dari satu atau beberapa kebijakan yang berupaya untuk mengelola *input*, implementasi akan dijalankan ketika penetapan tujuan sasaran sudah terlaksana kemudian adanya susunan program kegiatan, dan dana telah siap untuk dimanfaatkan dalam mencapai sasaran. Wahab menjelaskan implementasi kebijakan sebagai aspek penting dari keutuhan proses kebijakan (Sahya, 2012). hal itu sesuai dengan

pendapat Nugroho (2008) yang menjelaskan bahwa kebijakan implementasi dapat menentukan kegagalan atau keberhasilan dengan rasio rencana 20% keberhasilan, implementasi 60%, sisanya 20%. Abdullah (1988) pengertian dan unsur utama dalam proses implementasi adalah sebagai berikut:

- a) Proses implementasi kebijakan merupakan susunan kegiatan yang menindaklanjuti pengambilan keputusan, langkah strategis atau operasional yang dijalankan untuk mencapai suatu program atau kebijakan agar sasaran yang ditetapkan tercapai.
- b) Implementasi kebijakan pada kenyataannya bisa berhasil, kurang berhasil atau gagal dengan melihat hasil yang didapatkan berdasarkan beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap baik sifatnya memberikan dukungan atau hambatan pada sasaran program.
- c) Implementasi kebijakan atau program tidak bisa dijalankan dalam ruang hampa. Maka dari itu faktor lingkungan fisik, sosial budaya dan politik akan berpengaruh kepada proses implementasi.
- d) Kelompok sasaran diharapkan bisa menerima manfaat program tersebut.
- e) Terdapat program kebijaksanaan yang terlaksana.
- f) Unsur pelaksana atau implementor, baik organisasi maupun perorangan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan, dan mengawasi implementasi.

Dari beberapa pengertian tersebut, penulis menarik kesimpulan jika implementasi merupakan proses dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan ialah rangka dalam melaksanakan analisa pada proses terlaksananya kebijakan sebagai alat untuk memberikan

gambaran keadaan yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut. Berhasilnya implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak indikator yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Dibawah ini adalah beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli.

2.4.1 Model George C. Edward III (1980)

Edward (Subarsono, 2012) menjabarkan adanya empat indikator pengaruh kebijakan implementasi, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, 4) struktur organisasi/birokrasi. Keempat indikator tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mewajibkan implementor untuk memahami bagaimana tindakan yang harus dilakukan, apa tujuan dan sasaran yang harus dijabarkan dan direruskan kepada kelompok sasaran agar dapat mengurangi distorsi implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Jika isi kebijakan sudah dijabarkan dengan jelas dan konsisten tetapi terdapat kekurangan pada sumber daya untuk menjalankan implementasi tidak mungkin berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana.

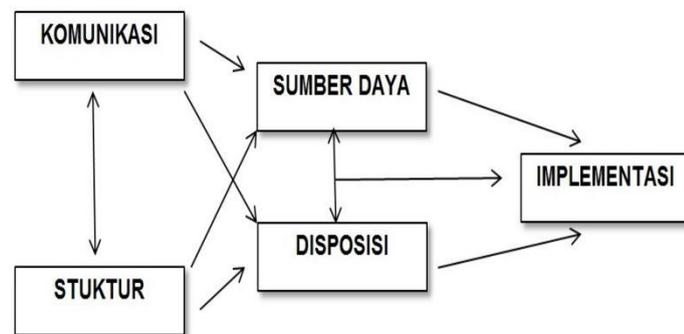
3) Disposisi

Disposisi merupakan sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki sifat yang

baik maka kebijakan akan terlaksana dengan maksimal. Sebaliknya, jika memiliki sifat yang berbeda dengan pembuat kebijakan akan menghambat proses implementasi.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satu aspek penting pada organisasi adalah adanya *standart operational procedure* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.



Gambar 3. Model Implementasi Edward III

Sumber (George C Edward III 1980)

2.4.2 Model Merilee S. Grindle (1980)

Grindle dalam Subarsono (2012) menjelaskan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua indikator besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Indikator isi kebijakan mencakup 1) sebesar apa kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan, 2) manfaat yang didapatkan kelompok sasaran, 3) sebesar apa perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak program tepat, 5)

apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan 6) apakah sebuah program ditunjang sumber daya yang memadai. Sedangkan indikator lingkungan kebijakan mencakup 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki aktor dalam implementasi kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.4.3 Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2012) terdapat lima indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus memiliki kejelasan, sehingga bisa terealisasi. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan menyebabkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program harus terdapat dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka diperlukan koordinasi

dan kerjasama antar instansi untuk keberhasilan program.

4) Karakteristik agen pelaksana

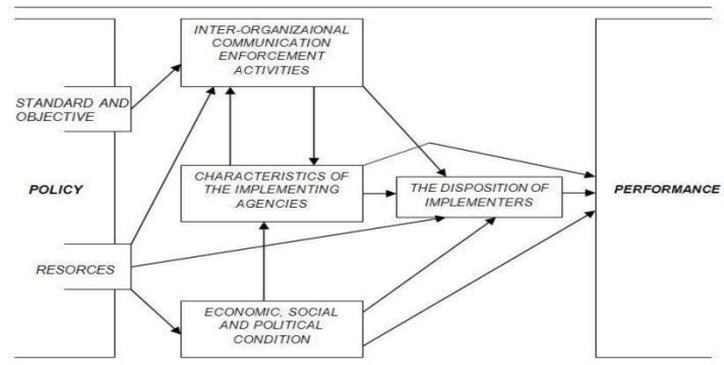
Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan berpengaruh terhadap implementasi program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Indikator ini meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat menyokong keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; individualitas para partisipan, yakni memberi dukungan atau penolakan; bagaimana kondisi pendapat publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik memberi dukungan implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan berpengaruh terhadap kemauannya untuk menjalankan kebijakan; b) kognisi yaitu pengetahuan terhadap kebijakan; c) intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn

sumber (Van Meter Van Horn 1975)

2.4.4 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Jones (1984) Implementasi adalah kegiatan untuk menjalankan sebuah program yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Jones (1984) dalam Rosita (2023) implementasi kebijakan terdiri dari tiga pilar utama yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

1) Pilar organisasi

Jones (1984) dalam Rosita (2023) Pilar organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dengan membentuk struktur organisasi, sumber daya dan metode dengan pelaksanaan dan pengarahan suatu program dalam upayanya menjalankan rancangan rencana dan mencapai tujuan. Organisasi bertujuan untuk menjelaskan dan melaksanakan program yang direncanakan. Kegiatan organisasi saat implementasi kebijakan berkaitan dengan penentuan unit kerja, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi menjadi sumber

daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi. Terdapat beberapa indikator dalam pilar organisasi yaitu:

a) Sumber daya

Yusuf, bekti & Sukarno (2017) dalam Rosita (2023). Sumber daya adalah aspek penting dalam pelaksanaan program karena dengan sumber daya dapat memengaruhi keberhasilan program. Kebijakan atau program mampu terlaksana dengan baik ketika memperhatikan kesiapan dan ketersediaan sumber daya pelaksana seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya finansial

b) Unit-unit atau struktur organisasi

Jones (1984) dalam Rosita (2023) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah sistem formal berupa aturan, tugas dan hubungan otoritas yang mengawasi kinerja para anggota organisasi dalam bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya dalam mencapai tujuan kebijakan yang ingin dicapai

c) Metode-metode

Nurkholilah (2021) dalam Rosita (2023) metode adalah suatu proses yang dijalankan untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber dan faktor yang menjadi penentu bagi keberhasilan proses manajemen dengan memerhatikan dinamika dan fungsi organisasi untuk

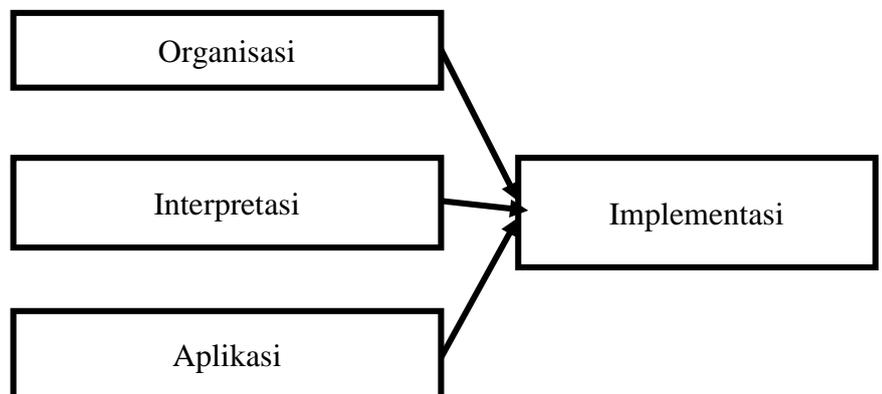
mencapai tujuan. Metode yang dimaksud adalah cara-cara yang digunakan organisasi untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai

2) Pilar Interpretasi

Jones (1984) dalam Rosita (2023) pilar interpretasi adalah kegiatan yang berupa penjelasan kepada implementor dan kelompok sasaran dengan memakai kosakata yang mudah dipahami agar mudah dimengerti maksud dari kebijakan dan tata cara pelaksanaannya. Pilar interpretasi bertujuan agar kebijakan bisa berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan

3) Pilar Aplikasi atau penerapan

Jones (1984) dalam Rosita (2023) pilar aplikasi adalah kegiatan yang merealisasikan kebijakan yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan. Kegiatan aplikasi harus memuat SOP yang jelas sehingga kebijakan bisa berjalan dengan jadwal yang sesuai. Prosedur kerja atau SOP juga digunakan untuk membantu pelaksana kebijakan tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Sumber: Jones 1984 dalam Rosita (2023)

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang sudah dijelaskan, peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1984) dalam Rosita (2023) dikarenakan model ini peneliti anggap mampu untuk memotret fenomena yang terdapat dalam implementasi program PKH di Pekon Wonodadi.

2.5 Tinjauan Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan sosial dengan syarat tertentu kepada keluarga atau perorangan miskin dan rentan yang terdaftar pada data terpadu program penanggulangan fakir miskin. Program tersebut adalah program yang dijalankan dengan pemberian bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan mewajibkan anggota keluarga RTSM penerima untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia Internasional, program sejenis ini dikenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Salah satu bentuk persyaratan tersebut adalah kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

2.5.1 Tujuan PKH

Tujuan utama program PKH adalah untuk meminimalisir angka dan memutus rantai kemiskinan, membaawa peningkatan pada kualitas sumber daya manusia, serta memberikan perbaikan pada tiggah laku yang tidak sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dari kelompok paling miskin. PKH secara umum bertujuan untuk memberikan peningkatn kualitas sumber daya manusia serta memperbaiki pola tingkah laku peserta

PKH yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan taraf hidup KPM dengan memanfaatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Meminimalisir beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Membentuk perbaikan tingkah laku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Menean kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.5.2 Keluarga penerima manfaat PKH

Sasaran penerima PKH telah diperbarui sejak tahun 2012 hingga sekarang. Data awal sasaran penerima manfaat PKH bersumber dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat itu sasarannya menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk memfasilitasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, kriteria KPM meliputi:

- 1) Ibu hamil/menyusui;
- 2) Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun;
- 3) Anak sekolah dasar sederajat;
- 4) Anak sekolah menengah pertama sederajat;
- 5) Anak sekolah menengah atas sederajat;
- 6) Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
- 7) Lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan
- 8) Penyandang disabilitas.

2.6 Tinjauan Kemiskinan

Menurut World Bank (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dalam melengkapi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Definisi kemiskinan yang disampaikan oleh Johnson dan Schwartz dalam Assegaf (2015:34), kemiskinan adalah kondisi dimana kurangnya pendapatan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya Nugroho (1995) menjelaskan kemiskinan adalah kondisi dimana masyarakat dipahami berdasar pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian Suryawati (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai masyarakat yang pendapatannya jauh dibawah rata-rata yang menyebabkan kurangnya kesempatan untuk memberikan kesejahteraan kepada dirinya. Dari beberapa definisi kemiskinan menurut ahli, dapat disimpulkan jika kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu individu atau kelompok memiliki kemampuan yang kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2.6.1 Jenis-jenis kemiskinan

Ditinjau dari jenisnya kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Individu digolongkan dalam kemiskinan absolut jika pendapatan yang dihasilkan ada dibawah garis kemiskinan yang ditentukan. Kemiskinan absolut menyebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

2. Kemiskinan Relatif

Individu digolongkan di miskin relatif jika orang tersebut merupakan orang miskin tapi masih ada dibawah garis kemampuan masyarakat umumnya. Masyarakat yang tergolong miskin relatif masih mampu dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan juga bisa digolongkan dari penyebabnya yang bisa dipahami kedalam dua sebab yaitu:

1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural yang penyebabnya adalah perilaku orang atau sekelompok orang yang tidak mau merubah taraf hidupnya dengan berusaha.

2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural yang penyebabnya dikarenakan sistem pembangunan yang kurang merata di seluruh wilayah atau juga karena rekayasa manusia.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2006) penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi yaitu:

1. Secara makro, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya yang dimiliki dan perbedaan pendapatan.
2. Kemiskinan yang disebabkan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia
3. Munculnya kemiskinan disebabkan karena terdapat perbedaan modal yang dimiliki.

Menurut Soetrisno (1990) menjelaskan beberapa faktor penyebab kemiskinan yang berhubungan terhadap aspek budaya yang ada di masyarakat, perbedaan dalam jumlah faktor produksi dan pendekatan

pembangunan yang digunakan negara. Dari beberapa penjelasan ahli tersebut, terjadinya kemiskinan memiliki dua teori yang bisa digunakan yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu teori marginalisasi dan ketergantungan (Usman,1993).

2.6.2 Indikator kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, pemerintah menggunakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 / Tentang Penetapan kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu. Selain menggunakan Kepmensos tersebut, untuk menentukan indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengukuran dengan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini berpatokan kepada *handbook on poverty and inequality* World Bank. Melalui konsep ini, kemiskinan ditinjau sebagai kurangmampunya dari segi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk menghitungnya digunakan metode penghitungan Garis kemiskinan (GK) yang terbagi menjadi dua komponen diantaranya Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan(GKMN). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan pengeluaran paling kecil dalam kebutuhan makanan yaitu 2100 kalori per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKMN) merupakan pengeluaran dalam kebutuhan papan, sandang, kesehatan dan pendidikan.

2.6.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan ialah usaha yang diagendakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya-upaya tersebut berupa program-program yang diajukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 46 tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Kabupaten/Kota). Sebagai regulasi terkait penanggulangan kemiskinan, pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan jika penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang harus ditanggulagi dan perlu langkah-langkah penanganan yang sistematis. Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah secara sistematis dan tersruktur dengan berbagai pihak untuk mengurangi penduduk miskin dan meingkatkan kesejahteraan. Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011) menjelaskan terkait prinsip yang harus dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu

- 1) memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial,
- 2) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
- 3) memberdayakan masyarakat yang miskin,
- 4) melakukan pembangunan yang inklusif.

Dalam menerapkan strateginya yang mengacu kepada 4 prinsip tersebut, terdapat beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

- (1) memberi pengurangan beban dalam pengeluaran masyarakat miskin,
- (2) memberi peningkatan kemampuan dan pendapatan,
- (3) melakukan pengembangan dan memberi jaminan keberlangsungan kepada usaha mikro kecil,
- (4) melakukan sinergi dalam menjalankan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

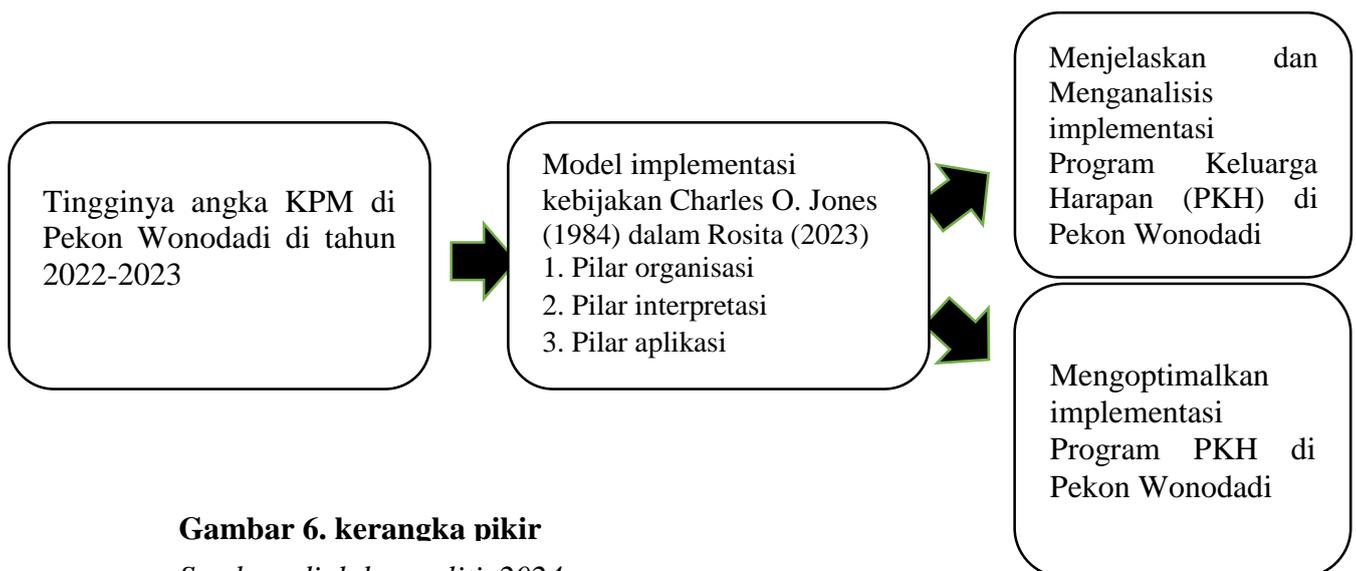
Dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011) menjabarkan Progam nasional terkait penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok menurut kelompok sasaran penerima program dan tujuannya, yaitu:

1. Kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat miskin agar bisa terlibat dalam pembangunan.

3. Kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang memiliki tujuan dalam pemberian akses serta memberikan penguatan ekonomi bagi usaha mikro kecil.
4. Program-program lain yang membantu kesejahteraan masyarakat miskin baik secara langsung atau tidak langsung.

2.7 Kerangka Berpikir

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat menjadi PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang mengarah pada proses pemenuhan kualifikasi tertentu. Pekon Wonodadi merupakan salah satu pekon yang terdapat program PKH. Jumlah KPM di Pekon Wonodadi merupakan yang paling tinggi di Kecamatan Gadingrejo, padahal PKH telah terlaksana sejak tahun 2012. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terjadi pergantian pendamping PKH dan pendamping kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dari permasalahan tersebut peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1984) dalam Rosita (2023) yang digambarkan pada kerangka pikir dibawah ini.



Gambar 6. kerangka pikir

Sumber: diolah peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, data yang akan diolah berupa tutur kata sehingga, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Farida (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sugiyono (2017) menjabarkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang terkait dengan data yang bukan angka dan bersifat naratif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program PKH di Pekon Wonodadi secara rinci, nyata dan akurat tentang fakta dan fenomena secara detail yang didapatkan dari informan.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah jawaban atas rumusan masalah dengan menetapkan fokus dan membatasi studi. Penelitian ini melihat dari model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1984) dalam Rosita (2023) yang terdiri dari tiga pilar yaitu, pilar organisasi, pilar interpretasi, dan pilar aplikasi. Fokus yang diteliti antara lain:

a. **Pilar Organisasi.**

Pilar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Pekon Wonodadi yang mencakup tentang:

1. Sumber daya manusia yang meliputi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKH yaitu Pendamping PKH

Koordinator Kecamatan Gadingrejo, Pendamping PKH Pekon Wonodadi dan Ketua Kelompok, sumber daya finansial yang meliputi anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PKH, serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan PKH.

2. Struktur organisasi yang membantu pelaksanaan program agar mempermudah alur koordinasi.
3. Metode dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PKH kepada KPM Pekon Wonodadi.

b. Pilar Interpretasi

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pendamping PKH kepada kelompok sasaran dalam menyampaikan maksud dan tata cara serta aturan dalam kebijakan tersebut dan tujuan serta sasaran kebijakan.

c. Pilar aplikasi

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang prosedur kerja dan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada KPM PKH Pekon Wonodadi dalam implementasi program PKH di Pekon Wonodadi.

3.3 Lokasi Penelitian

Moelong (2007) menentukan lokasi penelitian adalah salah satu cara untuk mempertimbangkan substansi dan menelusuri lapangan agar mendapatkan keserasian data. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pekon Wonodadi. Peneliti menentukan lokasi tersebut karena dilokasi tersebut terdapat permasalahan terkait jumlah KPM yang relatif paling banyak dari setiap pekon yang ada di Kecamatan Gadingrejo sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait implementasi program PKH di pekon Wonodadi.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian. Sumber data dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan karena dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data yaitu sumber data (Purhantara,2010). Data primer dan sekunder adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.4.1 Data primer

Data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian adalah data primer. Data primer dikumpulkan dengan berbagai metode yang telah ditetapkan. Pengumpulan data primer bermanfaat dalam menjawab indikator-indikator penelitian. Keakuratan data primer lebih dipercaya karena dikumpulkan langsung oleh peneliti Purhantara (2010). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi foto, rekaman suara, dan observasi. Wawancara yang dilakukan peneliti menuju kepada pendamping PKH Pekon Wonodadi, pendamping koordinator Kecamatan Gadingrejo, ketua kelompok KPM PKH Pekon Wonodadi, Kasi Kesejahteraan Pekon Wonodadi, dan Ketua Puskesmas Pekon Wonodadi. Observasi yang dilakukan yakni dengan mengikuti kegiatan pertemuan bulanan PKH Pekon Wonodadi.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tersedia dari berbagai sumber. Data sekunder biasanya data yang sudah diolah menjadi data yang valid oleh suatu instansi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa arsip pelaksanaan kegiatan dan data yang bisa mendukung penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut KBBI instrument adalah sarana atau alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Instrument penelitian ialah alat untuk memberikan bantuan kepada peneliti dalam mengumpulkan data pada proses penelitiannya. Instrumen yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Instrumen wawancara

Instrumen wawancara adalah acuan utama dalam peneliti ini untuk menanyakan dan mendapatkan informasi dari subjek untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya tentang fokus penelitiannya. Penelitian ini akan menggunakan instrumen wawancara untuk memperoleh data secara langsung..

b. Instrumen Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian berupa foto-foto kegiatan wawancara atau observasi yang dilampirkan, dan dokumen pendukung pelaksanaan PKH. Peneliti menggunakan *smartphone* sebagai alat yang digunakan dalam membantu mengumpulkan foto-foto dan rekaman wawancara

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk memperoleh data yang objektif dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam proses pengumpulan data, wawancara digunakn kepada informan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bertujuan mencari informasi mengenai objek penelitian. Penelitian ini melakukan wawancara kepada beberapa informan diantaranya:

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Bapak Junaidi, S.Pd	Pendamping PKH Pekon Wonodadi	14 Juni 2023 dan 22 Agustus 2023
2	Ibu Gesti Prihartini, S.Pd	Pendamping Koordinator Kecamatan Gadingrejo	12 Agustus 2023 (wawancara langsung) dan 18 Oktober 2023 (Via WA)
3	Bapak Fadhil Firdaus	Kasi Kesejahteraan Rakyat Pekon Wonodadi	15 Juni 2023
4	Bapak Muhammad Nahiri	Ketua Puskesos Pekon Wondadi	26 Juni 2023
5	Ibu Titi Ambarwati	Ketua Kelompok Dusun 1	18 Juni 2023
6	Ibu Winingsih	Ketua Kelompok Dusun 2	18 Juni 2023
7	Ibu Yatini	Ketua Kelompok Dusun 3	14 Juni 2023
8	Ibu Yunika Sari	Ketua Kelompok Dusun 4	17 Juni 2023
9	Ibu Sumarni	Ketua Kelompok Dusun 5	17 Juni 2023 dan 3 Oktober 2023
10	Ibu Masitah	Ketua Kelompok Dusun 8	17 Juni 2023

Sumber: diolah peneliti, 2024

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara kompleks selama penelitian menyangkut perilaku manusia, proses kerja atau fenomena alam dan jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini observasi dilakukan kepada

KPM PKH dan pendamping PKH pekon Wonodadi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan tidak terstruktur. Dalam observasi tidak terstruktur, peneliti dapat mengamati secara bebas dan mencatat hal-hal yang mungkin berguna dan mendukung data (Farida, 2014). Selama penelitian, peneliti melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan P2K2 untuk mengamati kegiatan yang dilakukan dan mengamati penjelasan pendamping PKH terkait pelaksanaan PKH di Pekon Wonodadi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi juga bias didapatkan dari buku, publikasi akademik, jurnal, dan peraturan pemerintah (Sugiyono, 2012). Agar data yang didapatkan semakin akurat, perlu dilakukan dokumentasi. Dalam hal ini dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan foto-foto yang dilakukan saat melakukan penelitian maupun melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan. Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumentasi
1	Panduan Pelaksanaan PKH 2021-2025
2	Laporan Pelaksanaan Bulanan Pendamping PKH Pekon Wonodadi
3	Permensos Nomor 1 Tahun 2018
4	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PKH Pekon Wonodadi 2023
5	Jadwal Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH pekon Wonodadi
6	Dokumen Profil Pekon Wonodadi

Sumber: Diolah peneliti 2023

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap menyeleksi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis dengan cara memahami dan memilih informasi yang paling penting kemudian membuat kesimpulan dari data tersebut (Sugiyono,2007). Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Farida (2014) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

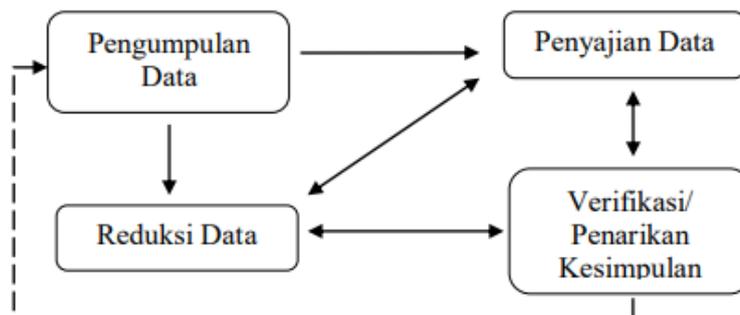
Reduksi data adalah penyederhanaan data dengan menyeleksi data yang didapatkan dilapangan menjadi data yang informatif dan sah.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan informasi yang sudah diseleksi dan disusun secara deskriptif dan sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melihat hasil reduksi data tetap kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.



Gambar 7. Model Analisis Data Interaktif

Sumber (Miles dan Huberman) dalam Farida (2014)

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang diperbarui dari konsep validitas atau keabsahan dan reliabilitas atau keandalan data menurut versi positivism dengan tuntutan pengetahuan (Farida, 2014). Beberapa contoh teknik keabsahan data dalam Farida (2014) adalah Ketekunan Pengamat, Triangulasi, Review Informan, Kecukupan Referensi, dan Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi. Keabsahan data dilakukan peneliti agar membuktikan data yang diperoleh sah dan tidak terindikasi plagiat. Berdasarkan teknik-teknik keabsahan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Uji Kredibilitas

Subroto dalam Farida (2014) menyatakan bahwa kredibilitas bias ditinjau dari tingkat validitas dan reliabilitas data tersebut. Data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan reliable jika terdapat secara meyakinkan dengan beberapa teknik yang berbeda. Penelitian ini hanya memakai beberapa cara untuk menguji kredibilitas data penelitian yang akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi artinya terdapat alat yang mendukung sebagai bukti data yang didapatkan peneliti. Sehingga data tersebut bias menjadi acuan dalam menguji dan menganalisis data (Farida, 2014). Kecukupan referensi yang digunakan yaitu alat perekam wawancara sebagai alat dukung yang mempermudah peneliti untuk mencatat dan membandingkan data yang didapatkan dari para informan dilapangan, notulensi wawancara, dan foto-foto selama melakukan wawancara.

b. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi dilakukan dengan melakukan perbandingan dan pengecekan tingkat kepercayaan informan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diakumulasikan berdasarkan derajat kesamaan informasi, jadi akan didapatkan kepercayaan yang sama. Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan teknik Triangulasi Teknik. Peneliti mewawancarai informan kemudian memastikan informasi yang disampaikan informan satu dengan informan lainnya untuk memastikan derajat kepercayaan, kemudian juga melihat dokumen-dokumen yang bias mendukung informasi yang disampaikan informan.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dijalankan dengan memvalidasi data dan informan yang sama dengan informan lainnya. Data tersebut akan ditampilkan dengan hasil dokumentasi yang terdapat kesamaan informasi. Tujuan teknik triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data yang sama dan tingkat validitas yang tinggi (Farida, 2014).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

- 1) Pilar Organisasi, pada pilar organisasi sudah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan sudah berjalan dengan baik, tetapi terdapat kurangnya koordinasi antara pendamping korcam Gadingrejo dengan pendamping PKH pekon Wonodadi
- 2) Pilar interpretasi, pada pilar interpretasi sudah sesuai dengan regulasi terkait PKH yaitu untuk menjelaskan maksud dan tujuan program kepada pelaksana dan sasaran program. Tetapi, terdapat hambatan karena pergantian pendamping yang menyebabkan kegiatan P2K2 terhambat.
- 3) Pilar aplikasi atau penerapan, pada pilar aplikasi atau penerapan sudah berjalan sesuai dengan regulasi PKH terutama terkait SOP program. SOP PKH di Pekon Wonodadi sudah mengikuti alur mulai dari pendaftaran KPM sampai dengan graduasi KPM. Untuk pendamping juga memiliki jadwal kegiatan dan membuat laporan bulanan pendamping.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan implementasi program keluarga harapan (PKH) di Pekon Wonodadi sudah berjalan sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendamping PKH Pekon Wonodadi dan pendamping korcam Gadingrejo diharapkan intens dalam berkoordinasi terkait jadwal kegiatan pendamping.
2. Pendamping diharapkan mengadakan pertemuan P2K2 pengganti untuk menggantikan pertemuan saat pendamping yang lama belum mengadakan pertemuan.
3. Pendamping diharapkan selalu mengadakan kegiatan P2K2 sesuai jadwal yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. I. (2020). *Manajemen Strategis*. CV Nas Media Pustaka: Makasar.
- Arifin, J. (2020). *Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. *Sosio Informa*, 6(2), 114-132.
- Abidin, J., Octaviani, R., & Nasdian, F. T. (2013). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pertanian di Kabupaten Bogor, Studi Kasus di Kecamatan Pemijahan Dan Leuwiliang*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2).
- Wahyuaniati, D. (2020). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batam*.
- Fatimah, F. N. A. D. (2016). *Teknik analisis SWOT*. ANAK HEBAT INDONESIA: Yogyakarta.
- Fahmi, G. R. A., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). *Analisis strategi penanggulangan kemiskinan di provinsi banten*. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2).
- Herawati Neti., dkk. 2020. *Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 20 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 4(2), 1684-1690.
- Kadji, Y. (2012). *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG*, 1-7.
- Kesuma, W. D., & Fanida, E. H. (2019). *Manajemen strategi program gerakan tengok bawah masalah kemiskinan (GERTAK) sebagai*

upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Trenggalek. Publika, 7(1).

Kemensos RI. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga*

Harapan (PKH). Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial: Jakarta.

Koswata, R. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga*

Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Studi Di

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Universitas

Lampung: Bandar Lampung

Larantika, A. A. D. (2017). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan*

Kemiskinan di Kabupaten Badung. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik), 8(2), 125-129.

Lailatul Alif J & Usrotin, I.C. (2022). *Comuunication In The*

Implementation Of The Family Hope Program In Kediri Regency.

Indonesian Journal of Public Policy Review. 20(1), 2-4.

Mahmud Fajrin., dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Program*

Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Enrekang. Jurnal

Administrasi Publik, 6(1), 18-33.

Mimbar Sumbar, Dinda. (2023). *Kelompok Penerima PKH di Sipora*

Jaya Rutin Gelar Pertemuan:

<https://mimbarsumbar.id/kelompok-penerima-pkh-di-sipora-jaya-rutin-gelar-pertemuan/>

Nandini Riska., dkk. (2020). *Peran Pendamping Program Keluarga*

Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa

Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Jurnal

Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(1),74-82

Nirwanasari. 2020. *Implementasi Program Bantuan Stimulan*

Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten

Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.

Persari, D., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2018). *Implementasi Strategi*

Pengembangan Kepariwisataaan. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi

Negara), 16(2), 104-109

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Penanggulangan Kemiskinan.

Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A.,

Damanik, D., ... & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi*

Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.

Ratna Aji K., dkk. (2014). *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap*

Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial

Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform, 2(1), 74-87

Retno Pratiwi., dkk. (2022). *Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(1), 47-55*

Rokhoul Akhmad. (2010). *Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.*

Rosita Dela. (2023). *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2021. Universitas Lampung: Bandar Lampung.*

Sandra Eno P. (2021). *Manajemen Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Pendampingan Komponen Kesehatan Ibu Hamil Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 3(2), 79-84.*

Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(2), 68-74.*

Syahrial, Desrina T. 2022. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman). Jurnal Ekonomika*

dan Bisnis. 2(1), 58-74

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*

Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung:Alfabeta.

TNP2K. 2011. *PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.* Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan: Jakarta Pusat.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*

analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative: Malang.

Yusrafitri, S. R. (2022). *Sinergitas Stakeholders dalam*

Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax*

Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(2), 2123-2137.